



BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL KABUPATEN ENDE TAHUN 2025–2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan...

Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 - 2026.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Sosial adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan

didalamnya ...

didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.

5. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 - 2025
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2019-2024.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2024.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
19. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
20. Daerah adalah Kabupaten Ende.
21. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
22. Bupati adalah Bupati Ende.
23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
24. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
26. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Kabupaten Ende.

BAB II PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

(3) Perencanaan ...

- (3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Renstra Dinas Sosial disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang perencanaan baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Sosial adalah :
 - a. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial setiap tahun.
 - b. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Dinas Sosial yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetiap bidang.
 - c. Sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Ende.
 - d. Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumberdaya sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
 - e. Sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Dinas Sosial dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BABIV

RENSTRA DINAS DINAS SOSIAL

Pasal 5

- (1) Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2026 memuat dan kebijakan serta program kegiatan Dinas Sosial yang berpedoman pada Perubahan RPD Tahun 2025-2026.
- (2) Sistematisa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
BAB IV	Tujuan dan Sasaran
BAB V	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII	Penutup

Pasal 6

Isi dan Uraian Renstra Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 7

- (1) Penyusunan Renstra Dinas Sosial melibatkan semua personil aparatur Dinas Sosial dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Dinas Sosial selama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kebutuhan-kebutuhan dan kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas.

Pasal 8

- (1) Rancangan Akhir Renstra disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial untuk diverifikasi.
- (2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi Kepala Dinas Sosial diajukan ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.
- (3) Kepala Dinas Sosial menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Dinas Sosial kepada semua, Pejabat Pengawas Administrator dan Pelaksana lingkup Dinas Sosial Kabupaten Ende.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KABUPATEN ENDE

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Sosial melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Sosial
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 10

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Sosial meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Administrator lingkup Dinas Sosial meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial melalui Bagian Sekretariat, Fungsional Perencana Ahli Muda sub koordinator substansi program, evaluasi dan pelaporan yang diketahui oleh Sekretaris.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Sosial melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Sosial.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan Kegiatan Program Dinas Sosial; dan
 - b. Hasil pelaksanaan Renstra Dinas Sosial.

Pasal 12

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Bidang/Bagian dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Badan.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing - masing Bidang/Bagian dalam rangka pencapaian Renstra Dinas Sosial.

Bagian Ketiga Perubahan

Pasal 13

- (1) Renstra Dinas Sosial dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi perubahan yang mendasar, atau
 - b. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Rensra Dinas Sosial ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende

Pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj. BUPATI ENDE,

AGUSTINUS G. NGASUA

Diundangkan di Ende

Pada tanggal 6 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE


EFREM DIAKON AINA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 33

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) DINAS SOSIAL
TAHUN 2025-2026**



KABUPATEN ENDE

2024

**ISI DAN URAIAN RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026**

DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	5
2.1.1 Tugas	5
2.1.2 Fungsi	5
2.1.3 Struktur Organisasi	5
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	10
2.2.1 Sumber Daya Manusia	10
2.2.2 Sarana dan Prasarana	11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	16
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	18
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	18
3.2 Isu Strategis	19
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	20
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026	20
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	21
BAB V. STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	26
BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	27
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	41
BAB VIII. PENUTUP	48

BABI PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

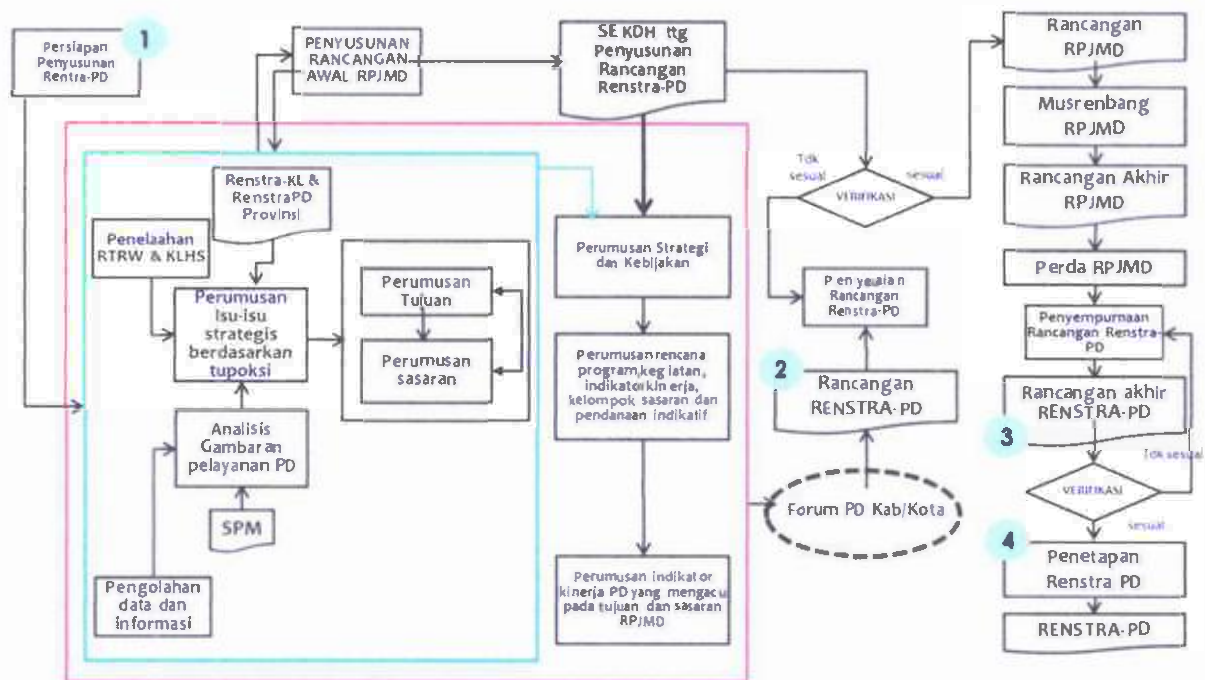
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap Daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Ende periode 2019-2024, maka sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024 wajib menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2025-2026. Sejalan dengan penyusunan RPD, Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2025-2026. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam aspek Sosial.

Dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Ende tersebut menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala urusan Sosial yang belum tertangani pada periode sebelumnya. Renstra Dinas Sosial juga menetapkan sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur. Dengan demikian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Ende.

Keterkaitan dan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1

Gambar 1.1.
Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1655),
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Sosial nomor 9 tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Provinsi dan di Daerah Kab/Kota;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende 2011 – 2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende;
15. Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende;
16. Peraturan Bupati Ende Nomor 42 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;
17. Peraturan Bupati Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025–2026 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian program Pemerintah Kabupaten Ende. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra akan digunakan oleh seluruh jajaran aparatur Dinas Sosial terutama di level pimpinan sebagai dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2025–2026 dan didalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Ende.

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ende adalah:

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, sekaligus juga sebagai pedoman dalam memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- b. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan urusan Sosial dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

- c. Melakukan analisis kebijakan di bidang Sosial untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut diatas.

14. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2026 terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, memuat informasi tentang tugas dan fungsi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta kelompok sasaran layanan).

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, memuat tentang permasalahan pelayanan perangkat daerah berdasarkan capaian kinerja perangkat daerah pada bab II dan isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, memuat tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran perangkat daerah dan *Cascading* kinerja perangkat daerah mulai dari tujuan, sasaran, *Outcome* dan *Output* serta indikatornya masing-masing.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, memuat tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN dan SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN, memuat tentang rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dan pemutakhirannya).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, memuat tentang penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan tujuan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2026 melalui indikator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah dan penentuan target kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB VIII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende serta Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende, tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Ende dan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende dan Peraturan Bupati Ende Nomor 42 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial maka perlunya Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ende adalah sebagai berikut:

2.1.1. Tugas

Membantu kepala daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah pada Urusan Wajib Pelayanan dasar Pemerintahan Daerah di bidang Sosial dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan pemerintah daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial Kabupaten Ende mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial,
- Pembinaan unit pelaksana teknis;

2.1.3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Ende adalah :

1. Kepala Dinas

mempunyai tugas Menyelenggarakan Urusan Teknis bidang Pemberdayaan Sosial, Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin.

2. Sekretariat

- 1) mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan Kordinasi Pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi;
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Koordinasi kegiatan
 - b. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - c. Pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi dan dan Pelaporan;
 - d. Pembinaan dan Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat serta kearsipan dan dokumentasi;
 - e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang /jasa; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain Yang diberikan oleh kepala Dinas;

3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas ;

- a. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
- b. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Penyiapan dan Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- e. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan
- f. Pengelolaan dan inventaris barang milik negara yang ada;
- g. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;

4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- 1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- 2) Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga
 - d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan soail dan,
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

5. Bidang Rehabilitasi Sosial

- 1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang rehabilitasi sosial.
- 2) Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan atau lembaga
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/ atau lembaga
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang luar panti dan/ atau lembaga
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan / atau lembaga
 - e. Pengolahan data pelayanan sosial Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi
 - f. Pengolahan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi
 - g. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan / atau lembaga, dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

6. Bidang Pemberdayaan Sosial

- 1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan sosial
- 2) Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawaan dan restorasi sosial
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial
 - e. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial, dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

7. Bidang Penanganan Fakir Miskin

- 1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan fakir miskin
- 2) Bidang penanganan fakir miskin menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara
 - d. Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan Kabupaten/ Kota
 - e. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang fakir miskin, dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

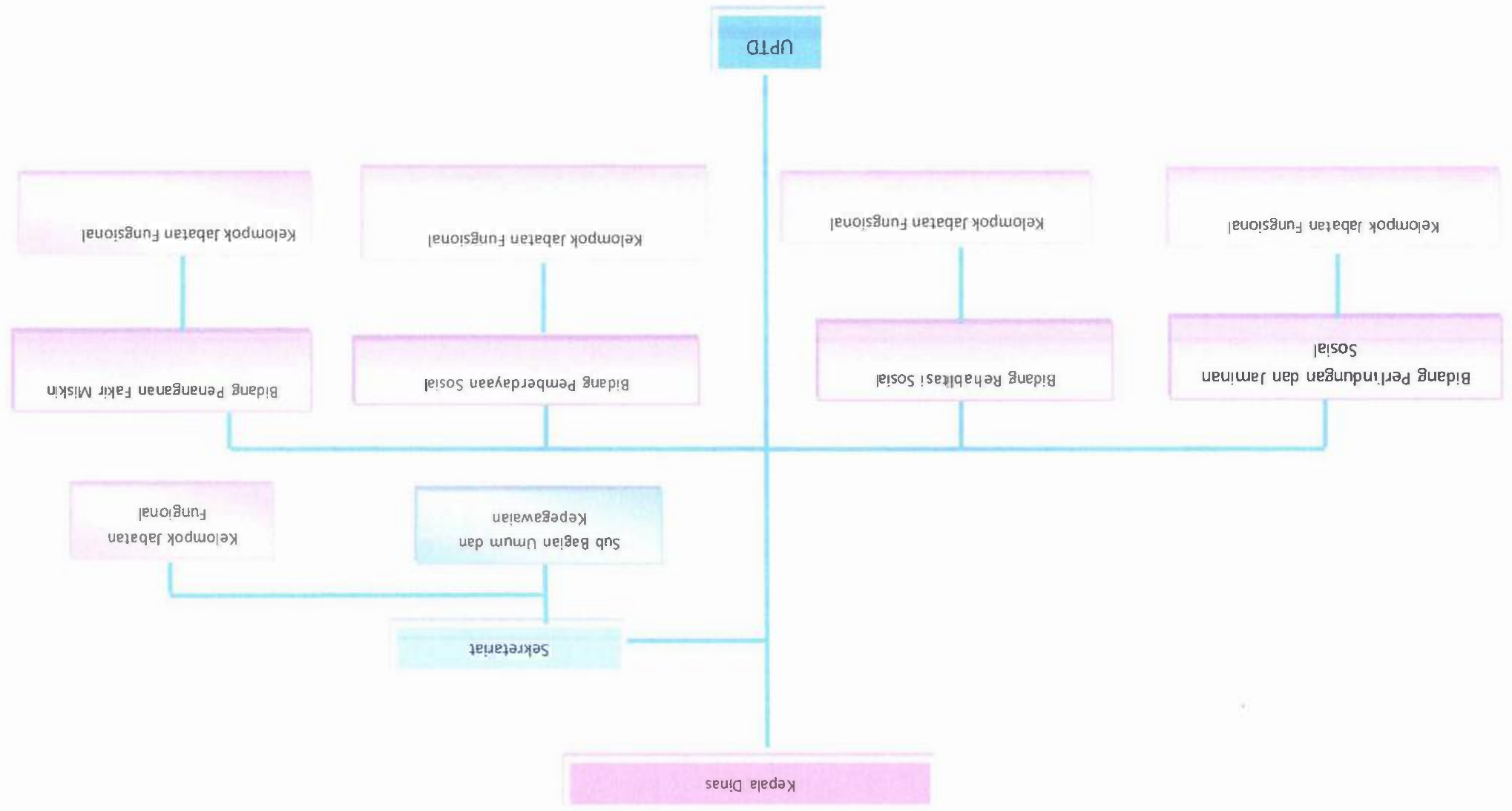
- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
 - b. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Dinas
 - c. Jumlah jabatan Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja
 - d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 1) Selain kelompok Jabatan fungsional di lingkungan Dinas terdapat unit organisasi jabatan administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian

dengan jabatan fungsional yang bersifat teknis maupun administratif berkesesuaian dan atau dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional.

- 2) Unit organisasi jabatan administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional terdiri atas sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.
- 3) Sub koordinator melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- 4) Sub koordinator terdiri atas:
 - a. Sub Koordinator Substansi Keuangan
 - b. Sub Koordinator Substansi Program, Evaluasi Dan Pelaporan
 - c. Sub Koordinator Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - d. Sub Koordinator Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - e. Sub Koordinator Substansi Jaminan Sosial Keluarga
 - f. Sub Koordinator Substansi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia
 - g. Sub Koordinator Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - h. Sub Koordinator Substansi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang
 - i. Sub Koordinator Substansi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga Dan Komunitas Adat Terpencil
 - j. Sub Koordinator Substansi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat Dan Perizinan Sumbangan
 - k. Sub Koordinator Substansi Kepahlawanan Dan Restorasi Sosial
 - l. Sub Koordinator Substansi Identifikasi Dan Penguatan Kapasitas
 - m. Sub Koordinator Substansi Pendampingan Dan Pemberdayaan
 - n. Sub Koordinator Substansi Bantuan Stimulan Dan Penataan Lingkungan Sosial
- 5) Sub koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang

9. UPT

- 1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
- 2) UPT merupakan bagian dari Dinas yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- 3) Pembentukan UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Keberadaan Sumber daya yang meliputi Sumber daya manusia, anggaran, sarana dan Prasarana, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan menjadi Faktor Penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan Peran Dinas Sosial Kabupaten Ende. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ende didukung oleh 28 (Dua puluh delapan) Pegawai Negeri Sipil ini dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
JUMLAH PEGAWAI ASN DAN TENAGA HONORER DINAS SOSIAL

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	ASN DAN HONORER		TOTAL
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3		4
1	Pasca Sarjana	1	0	1
2	Sarjana	7	16	23
3	Diploma	0	0	0
4	SMU	3	2	5
5	SLTP	0	0	0
6	SD	0	0	0
	Jumlah	11	18	29

(Sumber: Data Pegawai Dinsos, Keadaan Per. Desember 2023)

Bila dilihat berdasarkan kepangkatan dan golongan sumber daya manusia pada Dinas Kabupaten Ende dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
**JUMLAH PEGAWAI DINAS SOSIAL
BERDASARKAN KEPANGKATAN**

NO	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
1	2	3		4
1	Pembina Utama Muda /IV c	1	0	1
2	Pembina Tk. I / IV b	0	1	1
3	Pembina/ IV.a	2	2	4
4	Penata Tingkat I / III d	5	6	11
5	Penata / III c	-	2	2
6	Penata Muda Tingkat I / III b	1	1	2
7	Penata Muda / III a	1	2	3
8	Pengatur Tingkat I / II d	1	1	2
9	Pengatur Muda Tk. I / II b	-	-	-
10	Pengatur / II c	-	-	-
11	Pengatur Muda Tk. I / II a	0	0	0
12	P3K-9	1	2	3
	Jumlah	12	17	29

(Sumber: Data Pegawai Dinsos, Keadaan Per. Desember 2023)

Selain paratur Pegawai Negeri Sipil, Dinas Sosial, juga memiliki tenaga Relawan atau petugas lapangan yang terdiri dari 8 (Delapan) orang.

Tabel 2.5
JUMLAH POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN ENDE

NO	JENIS PSKS	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
1	2	3		4
1	Pekerja Sosial Profesional	1	-	1
2	TAGANA (Taruna Siaga Bencana)	38	13	51
3	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)			17
4	Karang Taruna (KT) (Kelompok)	102		102
5	Organisasi Sosial			
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	9	3	11
7	TKSK /Tenaga kesejahteraan Sosial kecamatan	19	2	21
8	Pendamping Cacat	6	2	8
9	Pendamping Lansia	4	2	6
10	Pendamping Keluarga Harapan	29	18	47
11	Operator Komputer PKH	2	2	4

(Data PSKS Dinsos, Keadaan Per Desember 2023)

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana, antara lain :

a. Perlengkapan

Kondisi sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ende dapat difungsikan secara optimal, namun pemeliharaan terhadap prasarana/sarana kerja secara rutin harus dilakukan dengan baik. Hal ini membutuhkan biaya pemeliharaan yang memadai agar sarana dan prasarana dapat digunakan secara maksimal.

b. Gedung Kantor

Gedung Kantor yang kini digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ende merupakan asset dari Propinsi Nusa Tenggara Timur. Keadaan gedung kantor sudah sangat tua sehingga perlu di rehabilitasi atau dibangun gedung yang baru demi kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugas.

c. Peralatan Kantor

Keadaan kondisi barang inventaris Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
DAFTAR INVETARIS BARANG

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			B	RB	RR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	3	√			Luas Tanah d LBK : 822M2, Tanah Mess 150 M2, Tanah Bangunan Kantor : 1770 M2 Tanah bangunan LBK Baru : 620 M2 Tanah Bangunan LBK lama d lor : 200M2
2	BanguanGedung Kantor	1			√	Luas Bangunan : 250 M2
3	Bangunan LBK	2			√	Luas Bangunan : 240M2
4	Bangunan Aula	1	√			Luas bangunan : 112 M2
5	Bangunan Rumah Dinas	1			√	Luas Bangunan : 80 M2
6	Kendaraan Roda 4	2	√			
7	Kendaraan Roda 2 :	10	√	√		6Baik Rusak berat 4
8	Meja Kayu	39	√	√		Baik 15 buah rusak berat 4
9	Kursi Kayu	30	√			
10	Kursi Plastik	26		√		
11	Kursi Falas	31		√		
12	Kursi Big Star	8		√		
13	Kursi Fitura	3		√		
14	Kursi Alpen	6		√		
15	Lemari	13		√	√	
16	Komputer	10		√		
17	Laptop	17			√	
18	Tustel Digital	4	√			
19	Kipas Angin	1		√		
20	Warles	1	√			
21	Parabol	1		√		
22	LCD Komplit	2	√	√		
23	Meja Rapat	6	√			
24	Jam Dinding	3	√			
25	Ac	2	√			
26	Dispencer	2	√			
27	Filing Kabinet	2			√	

(Sumber Laporan Inventaris Barang Dinsos, Keadaan Per Desember 2023)

Dari tabel sebagaimana tersebut diatas, dengan kondisi Sarpras 5 tahun yang akan datang Dinas Sosial memerlukan aset yang baru sebagai penunjang pelayanan antara lain, Laptop 2 buah, Meja sebanyak 10 buah, Komputer 3 buah, Kursi 10 buah, lemari 5 buah, Pembangunan Gedung kantor, dan ruang konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Ende dapat diukur dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD Kabupaten Ende). Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut tabel 2.7 dibawah ini:

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Ende

Tabel Sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019

Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RKPD (th.2023)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke			Realisasi Capaian pada tahun Ke			Rasio Capaian pada tahun Ke		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Persentase(%) PPKS yang tertangani	36,02	36,31	39,15	39,28						
Persentase(%) PPKS yang diberdayakan	100	98,59	100	100						
Nilai AKIP Dinas Sosial	B	BB	BB	BB						

Dari tabel awal pencapaian kinerja pelayanan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **BIDANG SOSIAL :**

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dari 4 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Kabupaten Ende pada tahun 2023, **4 indikator menunjukkan capaian kinerja SANGAT TINGGI (91 ≥)**. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh perangkat dinas dan dukungan *stakeholder*. Meskipun Untuk sejumlah target IKU Dinas Sosial Kabupaten Ende yang tingkat pencapaiannya, mencapai peringkat capaian kinerja sangat tinggi pada tahun 2023, masih tetap diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, focus dan terarah dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi.

- **Indikator Nilai AKIP DINSOS**

Pada tahun 2023 capaian indikator nilai AKIP DINSOS mencapai peringkat B dengan target B. Hal ini berdasarkan capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2023.

- **Indikator Persentase PPKS yang tertangani/diberdayakan**

Pada tahun 2022 PPKS yang tertangani berjumlah 29.437 jiwa dengan total PPKS sebanyak 75.699 jiwa dengan realisasi sebesar 38,89 % dari target realisasi sebesar 35,65%.

Pada tahun 2023 PPKS yang tertangani berjumlah 18.897 jiwa dengan total PPKS sebanyak 35.920 jiwa dengan realisasi sebesar 52,61% dari target realisasi sebesar 35,98%. Penurunan jumlah jiwa yang ditangani disebabkan karena bantuan cadangan pangan yang bersumber dari APBN (Kementerian Sosial) sudah dialihkan Ke Badan Pangan Nasional (Bappanas dan berkurangnya Data DTKS/kemiskinan Karena Desa/Kelurahan Sudah Melakukan Verifikasi dan Validasi Data,-

Permasalahan yang dialami pada urusan Sosial adalah banyak jumlah Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menderita atau miskin di Wilayah Kabupaten Ende. Faktor Penyebab adalah tidak terpenuhinya kebutuhan pokok semnetara pendapatan tidak meningkat,enggannya keluarga atau orang untuk menolong para penderita PPKS,kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Pemerlu Pelayanan Penderita PPKS .adapun solusi yang diberikan dengan :

- Memberikan Latihan Ketrampilan Kerja bagi Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS)
- Membina kelompok usaha bersama berupa Kios,peternakan ,menjahit dan Perbengkelan
- Bagi Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berusia sekolah dapat diberi kesempatan untuk belajar di Sekolah Luar Biasa(SLB) dan diasramakan didalam panti;
- Bantuan sarana dan prasarana Panti dan permakanan bagi anak terlantar,cacat dan jompo

- **Indikator Persentase PSKS yang diberdayakan**

Pada tahun 2023, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan berjumlah 137 jiwa dengan rincian, Pendamping PKH sebanyak 74 jiwa, Tenaga Kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) 21 jiwa dan Taruna Siaga bencana sebanyak 42 jiwa.

Kinerja pelayanan Dinas Sosial juga diukur melalui kinerja realisasi anggaran dan pendanaan pembangunan sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Ende

Uraian	Anggaran		Realisasi			Ratio		
	2022	2023	2022	2023	2024	2022	2023	2024
4	5	6	7	8	9	10	11	
BELANJA	5.217.944.119,-	2.508.552.341,-	4.981.506.323,-	2.467.628.647,-		95,46%	98,28%	-
Belanja Operasi	5.095.817.619,-	2.433.533.841,-	4.859.825.989,-	2.467.628.647,-		95%	98,36%	-
Belanja Pegawai	2.772.940.178,-	1.965.312.341,-	2.633.941.073,-	1.930.668.047,-		95%	98,24%	-
Belanja Barang dan Jasa	783.112.241,-	438.221.500,-	736.584.992,-	433.047.200,-		94%	98,82%%	-
Belanja Hibah	1.425.950.000,-	-	1.377.853.105,-	-		96%	-	-
Belanja Bantuan Sosial	113.815.200,-	30.000.000	111.446.819,-	28.894.900		98%	96,32%	-
Belanja Modal	122.126.500,-	75.018.500,-	121.680.334,-	72.750.300,-		99%		-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.126.500,-	75.018.500,-	21.681.185,-	72.750.300,-		98%	96,98%	-
Belanja Gedung dan Bangunan	100.000.000,-	-	99.999.149,-	-		100%	-	-

(Sumber: Data LKPJ Dinsos)

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Penyelenggaraan sosial merupakan kewajiban dari setiap pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun demikian penyelenggaraan sosial bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan yang terjadi di dalamnya jauh sangat kompleks. Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran garapan dari Dinas Sosial Kabupaten Ende ialah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang sebagian besar diantara mereka merupakan penduduk miskin yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya di masyarakat secara wajar. Penyebab terjadinya berbagai permasalahan sosial yang diderita oleh para PPKS ini sangat bervariasi, hal tersebut kita dapat kelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu yang dikarenakan faktor eksternal dan internal, faktor eksternal diantaranya kejadian bencana alam/sosial, kebijakan pemerintah, serta pengaruh lingkungan, sedangkan faktor internal diantaranya tingkat pendidikan yang rendah serta keterbatasan fisik atau mental yang dimiliki oleh seorang individu. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dalam bidang sosial ini sangatlah tinggi karena selain dirasakan langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan ialah semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin pada daerah tersebut atau dengan kata lain warga masyarakatnya sejahtera. Tuntutan terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Ende tidak hanya muncul dari masyarakat akan tetapi juga dari pihak pemerintah pusat maupun provinsi, hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, dimana tujuan dari SPM tersebut ialah menyelaraskan penyelenggaraan pembangunan bidang sosial sekaligus dalam rangka percepatan penuntasan permasalahan sosial di seluruh daerah di Indonesia sehingga menuntut pihak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran serta sumber daya lainnya secara memadai guna mencapai target Standar Pelayanan Minimal.

Adapun kelompok Sasaran layanan dari Dinas Sosial Kabupaten Ende ialah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdiri dari:

1. Anak Balita Telantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK)
6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah
7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Telantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA

18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu Strategis ini merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Strategis karena menjadi Dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan daerah. Uraian permasalahan pembangunan mengawali bagi analisis isu-isu strategis ini, dimaksud sebagai acuan untuk merumuskan isu-isu strategis yang menentukan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Permasalahan strategis yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penanganan PPKS dan PSKS antara lain :

1. Anggaran yang tersedia belum memadai/minim ;
2. Kurangnya Kompetensi dalam pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial ;
3. Terbatasnya Sarana dan Prasarana dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial ;
4. Tidak adanya tindak lanjut atau belum maksimalnya intervensi Program Pemerintah Daerah bagi PPKS yang terdata dalam DTKS.
 1. Belum terintegrasinya penanggulangan kemiskinan antar sector;
 2. Belum Optimalnya Penanggulangan bencana alam;
 3. Belum optimalnya Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
 4. Terbatasnya Jumlah SDM aparatur yang professional dibidang Pekerja Sosial;
 5. Terbatasnya aksibilitas pelayanan kesejahteraan sosial secara merata oleh seluruh masyarakat khususnya PMKS.

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Masyarakat Miskin yang belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Masih lemahnya penanganan Kemiskinan akibat Data kemiskinan yang belum valid dan sinkron sehingga menimbulkan tidak tepatnya sasaran penerima bantuan kepada masyarakat miskin.	Kurangnya SDM dan koordinasi Operator SIK-NG Desa dalam memverifikasi dan Validasi Data Kemiskinan dengan Kabupaten.
2	Penanganan PPKS yang belum Optimal	Belum optimalnya dalam penanganan korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Kurang tanggapnya Masyarakat korban Bencana Alam dan Bencana Sosial untuk melaporkan atas kejadian yang menimpanya.
		Penguatan kapasitas bagi penanganan PPKS	Upaya peningkatan penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosia

Dari isu strategis tersebut diatas, penanganan kemiskinan dalam hal ini kemiskinan Ekstream adalah merupakan isu utama Dinas Sosial dengan indikator pembangunan RPD Kabupaten Ende pada sasaran 6 yaitu Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin dengan indikator laju penurunan jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut, maka strategi yang diperlukan adalah :

1. Peningkatan Pelayanan, perlindungan, pemberian bantuan sosial, jaminan sosial serta rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
2. Pendekatan berbasis Hak Dasar (sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan) melalui data yang terintegrasi (satu data) yang akan dipakai setiap sector dalam penanggulangan kemiskinan;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi petugas penanggulangan bencana khususnya bantuan sosial korban bencana alam, meningkatkan jumlah bantuan sosial bagi korban bencana alam;
4. Pembinaan dan optimalisasi peran/keterlibatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya kesejahteraan sosial;
5. Pembinaan dan monitoring Lembaga Kesejahteraan Sosial
6. Penyediaan sarana prasarana/tempat perlindungan untuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi PMKS dengan pelibatan dunia usaha dan masyarakat yang peduli pada masalah-masalah kesejahteraan social.

3.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Perubahan Kementerian dan Renstra Perubahan Dinas Kab/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Sejalan dengan Tugas dan Fungsi, dengan memperhatikan Isu Nasional dan Propinsi maka isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Ende adalah sbb:

1. Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Belum terintegrasinya penanggulangan kemiskinan antar sektor
3. Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial
4. Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
5. Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraan sosial masih sangat terbatas.
6. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya serta tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025- 2026 yang mejadi tugas Dinas Sosial Kabupaten Ende dalam melaksanakan pembangunan di bidang Sosial di Kabupaten Ende.

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026

4.1.1 Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam Rencana Pembangunan Daerah adalah *"Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial bagi PPKS"* dengan Indikator Kinerjanya adalah *1. Persentase PPKS yang Tertangani dan 2. Persentase PSKS yang Diberdayakan*

4.1.2 Sasaran RPD periode 2025–2026 yang ingin dicapai yaitu

1. Menurunnya kemiskinan masyarakat
2. Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien
3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Rasa Aman Dan Nyaman Bagi Pengembangan Usaha Dan Kehidupan Serta Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat

Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 beserta indikator kinerjanya selengkapnya disajikan dalam tabel 4.1

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator RPD Periode 2025 s/d 2026

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun ke-			Kondisi Akhir
				1	2	3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Menurunnya kemiskinan masyarakat	Persentase penduduk miskin	23%	22,21 %	22,08 %	21,95 %	21,95 %
	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Nilai AKIP)	CC (53,33) Nilai	B (60,21) Nilai	B (61,42) Nilai	B (62,23) Nilai	B (62,23) Nilai
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Rasa Aman Dan Nyaman Bagi Pengembangan Usaha Dan Kehidupan Serta Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat	Indeks Pelayanan Sosial	32,89 Indeks	39,02 Indeks	39,15 Indeks	39,28 Indeks	39,28 Indeks

4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 4.2
Cascading Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial bagi PPKS														
Meningkatnya perlindungan PPKS														
		1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN											
			Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan Penanganan	100 %	100 %	75.000.000,00	100 %	85.000.000,00	100 %	90.000.000,00	100 %	Bidang Rehabilitasi Sosial		
		1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarかさ di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal											
			Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan Penanganan	100 %	100 %	75.000.000,00	100 %	85.000.000,00	100 %	90.000.000,00	100 %	Bidang Rehabilitasi Sosial		
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL											
			Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	12,72 %	100 %	175.000.000,00	100 %	180.000.000,00	100 %	185.000.000,00	100 %	Bidang Rehabilitasi Sosial		
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial											
			Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	12,72 %	100 %	780.000.000,00	100 %	81.500.000,00	100 %	82.900.000,00	100 %	Bidang Rehabilitasi Sosial		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantu Sosial											
			Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar pantu sosial	12,72 %	100 %	97.000.000,00	100 %	98.500.000,00	100 %	102.100.000,00	100 %	Bidang Rehabilitasi Sosial		
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA											
			Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 %	100 %	400.000.000,00	100 %	415.000.000,00	100 %	430.000.000,00	100 %	Bidang Rehabilitasi Sosial		
		1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota											
			Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100 %	100 %	320.000.000,00	100 %	32.500.000,00	100 %	339.000.000,00	100 %	Bidang Rehabilitasi Sosial		
		1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota											
			Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100 %	100 %	80.000.000,00	100 %	90.000.000,00	100 %	91.000.000,00	100 %	Bidang Rehabilitasi Sosial		
Meningkatnya peran PSKS dalam pembaangunan bidang kesejahteraan sosial														
		1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN											
			Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	100 %	100 %	50.000.000,00	100 %	55.000.000,00	100 %	60.000.000,00	100 %	Bidang Rehabilitasi Sosial		
		1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota											
			Terlaksananya Pemeliharaan TPM Nasional Kabupaten	1 Orang	1 Orang	50.000.000,00	1 Orang	55.000.000,00	1 Orang	60.000.000,00	1 Orang	Bidang Rehabilitasi Sosial		
Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial bagi PPKS														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Menurunnya Angka kemiskinan														
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL											
			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	100 %	100 %	250.000.000,00	100 %	255.000.000,00	100 %	260.000.000,00	100 %	Bidang Pemberdayaan Sosial		
		1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)											
			Terlaksananya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	Bidang Pemberdayaan Sosial		
		1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota											
			Terlaksananya Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	Bidang Pemberdayaan Sosial		
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota											
			Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	67 Orang	67 Orang	250.000.000,00	70 Orang	255.000.000,00	75 Orang	260.000.000,00	75 Orang	Bidang Pemberdayaan Sosial		
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL											
			Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial	76,64 %	77,01%	200.000.000,00	77,37 %	205.000.000,00	77,74%	210.000.000,00	77,74%	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial		
		1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar											
			Terlaksananya Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	0 Orang	30 Orang	100.000.000,00	35 Orang	102.500.000,00	40 Orang	105.000.000,00	40 Orang	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial		

Tujuan	Basaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		106.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											
			Terkelolanya Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	2 Dokumen	102.500.000,00	2 Dokumen	105.000.000,00	2 Dokumen	Bidang Fakir Miskin		
Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial bagi PPKS														
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja														
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	11.500000,00	100 %	14.200000,00	100 %	17.200000,00	100 %	Sekretariat Dinas Sosial		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.665.928.774,00	100 %	1.671.245.699,00	100 %	1.672.808.746,00	100 %	Sekretariat Dinas Sosial		
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	26.000.000,00	100 %	26.000.000,00	100 %	26.500.000,00	100 %	Sekretariat Dinas Sosial		
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	7.500000,00	100 %	8.500.000,00	100 %	9.500.000,00	100 %	Sekretariat Dinas Sosial		
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	33.000.000,00	100 %	45.000.000,00	100 %	54.000.000,00	100 %	Sekretariat Dinas Sosial		
		XXX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	217.500000,00	100 %	220.000.000,00	100 %	220.000.000,00	100 %	Sekretariat Dinas Sosial		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	28.000.000,00	100 %	33.000.000,00	100 %	40.000.000,00	100 %	Sekretariat Dinas Sosial	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	141.000.000,00	100 %	143.000.000,00	100 %	151.000.000,00	100 %	Sekretariat Dinas Sosial	

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Ende selama 2 (dua) tahun ke depan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025–2026, selengkapnya dilihat dalam tabel 5.1 dibawah ini :

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan sebagai berikut:

Tujuan PD	Sasaran PD	Strategis	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial bagi PPKS	1. Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien	-Peningkatan tata kelola dan kinerja dinas sosial	- Meningkatkan akuntabilitas kinerja perencanaan dan penganggaran - Meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan - Meningkatkan optimalisasi pengelolaan SDM, sarana dan prasarana pelayanan
	2. Meningkatnya Perlindungan PPKS	- Peningkatan rehabilitasi sosial terhadap penduduk	-Meningkatkan aksesibilitas sosial penyandang disabilitas -Meningkatkan aksesibilitas sosial penyandang disabilitas -Meningkatkan penyandang tuna sosial yang berubah perilakunya
		- Peningkatan partisipasi sumberdaya kesejahteraan sosial berbasis masyarakat	- Meningkatkan pemberdayaan terhadap Potensi & Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga Sosial - Meningkatkan pemberdayaan terhadap Pilar-pilar Sosial - Meningkatkan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial
		- Peningkatan kualitas penanganan fakir miskin perkotaan/Perdesaaan	- Meningkatkan kualitas penyaluran bantuan sosial penanggulangan kemiskinan - Meningkatkan kualitas pendampingan potensi ekonomi penduduk miskin - Meningkatkan kualitas pendampingan bantuan stimulan program nasional penanggulangan kemiskinan
		- Verifikasi dan Validasi Data DTKS sebagai data Utama dan Pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu mengentas	- Optimalisasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
		-Peningkatan perlindungan sosial terhadap penduduk beresiko darurat sosial	- Menyediakan bantuan sosial korban bencana alam dan sosial
	3. Meningkatnya Peran PSKS dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	- Mengoptimalkan pemberdayaan PSKS	- Meningkatkan SDM bagi Pendamping Sosial - Meningkatkan Peran aktif Pendamping Sosial dan Masyarakat - Meningkatkan perlindungan sosial terhadap korban bencana alam

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan, maka langkah operasioanalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025–2026 sebagai berikut dan dapat dilihat pada tabel 6.1 dibawah ini :

TABEL 6
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS SOSIAL KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Out put)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
				2024		2025		2026				
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1,06,1,06,01,01	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.1.1 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun		100	2.130.428.774	100	2.160.945.699	100	2.191.008.746	6.482.383.219		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	11.500.000	100	14.200.000	100	17.200.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan PD		4	2.500.000	4	3.000.000	4	3.500.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya dokumen Perubahan RKA yang tersedia		1	500.000	1	1.000.000	1	1.200.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA yang tersedia		1	500.000	1	600.000	1	1.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen Perubahan DPA yang tersedia		1	500.000	1	600.000	1	1.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Laporan yang tersedia		1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan yang tersedia		1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	1.665.928.774	100	1.671.245.699	100	1.672.808.746	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		30 orang / 14 Bulan	1.656.428.774	30 orang / 14 Bulan	1.661.745.699	30 orang / 14 Bulan	1.663.308.746	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.02.012	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		30 orang / 14 Bulan	2.500.000	30 orang / 14 Bulan	3.000.000	30 orang / 14 Bulan	3.500.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
				2024		2025		2026				
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Verifikasi Seluruh Bahan Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan Perangkat Daerah		3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Akuntansi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Regulasi yang Berlaku		3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.500.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah (Laporan Keuangan Tahun n)		1	250.000	1	2.500.000	1	2.500.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya bahan tanggapan Pemeriksa		1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Pelaporan Kegiatan Bulanan dan Semester		12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100	26.000.000	100	26.000.000	100	26.500.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Penjaga Malam		1 orang 12 bulan	10.000.000	1 orang 12 bulan	10.000.000	1 orang 12 bulan	10.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Administrasi Pengelolaan Aset secara Baik dan Benar		2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Aset secara Baik dan Benar		2	2.500.000	2	2.500.000	2	3.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD		2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	7.500.000	100	8.500.000	100	9.500.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
				2024		2025		2026				
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
701.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya mesin absensi		1	1.500.000	-	1.500.000	-	2.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas ASN		35	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pengelolaan Data Kepegawaian secara Baik		1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.500.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
70101.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun		1	-	1	-	1	-	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
70101.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		1	-	1	-	1	-	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN		1	500.000	1	500.000	1	500.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Diklat Tusi Pegawai		5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		2	-	2	500.000	2	500.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan		2	-	2	500.000	2	500.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	44,36	100	33.000.000	100	45.000.000	100	54.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik		5	3.000.000	5	5.000.000	5	6.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10	2.000.000	5	3.000.000	5	3.500.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		3	500.000	0	1.000.000	0	1.500.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Out put)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
				2024		2025		2026				
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor (Kertas)		20	500.000	20	500.000	20	1.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		10	2.500.000	10	2.500.000	10	3.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan/ Surat Kabar Lokal dan Nasional		1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/ Material	Tersedianya Penyediaan Bahan /Material		1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan dan Minum Tamu		12	1.000.000	12	2.500.000	12	3.500.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		36	20000.000	36	25.000.000	36	30000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100	217.500.000	100	220.000.000	100	220.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan		-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional		3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel		20	2.500.000	20	2.500.000	20	2.500.000	20	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		5	2.500.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya		5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	5	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	Dinas Sosial	Dinas Sosial

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
				2024		2025		2026				
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya SSarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	28.000.000	1	33.000.000	100	40.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	500.000	12	500.000	12	1.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12	20.000.000	12	25.000.000	12	30.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1	2.000.000	1	2.000.000	1	3.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		1	5.500.000	1	5.500.000	1	6.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100	141.000.000	100	143.000.000	100	151.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		12	5.000.000		5.000.000	12	8.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		12	6.000.000	1	6.000.000	1	9.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel		5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5	5.000.000	5	7.000.000	5	8.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100	10.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
				2024		2025		2026				
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		12	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
01.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial			200.000.000		205.000.000		210.000.000		Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.05.2.01	1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Cakupan Anak Terlantar		30	100.000.000	40	102.500.000	45	105.000.000		Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	terlaksananya penjangkauan anak-anak terlantar	0	30	25.000.000	35	26.000.000	45	27.000.000		Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Rujukan anak-anak terlantar	0	30	50.000.000	35	50.500.000	45	51.000.000		Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	0	30	25.000.000	35	26.000.000	45	27.000.000	42,65	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengusulan baru data DTES		2	100.000.000	2	102.500.000	2	105.000.000	42,65	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin	185.994	186.000	25.000.000	186.100	25.500.000	186.200	26.000.000	42,65	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin	52.457	52.557	25.000.000	52.657	26.000.000	52.757	27.000.000	42,65	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	50	25.000.000	60	25.500.000	70	26.000.000	42,65	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0	150	25.000.000	160	25.500.000	170	26.000.000	42,65	Dinas Sosial	Dinas Sosial

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Out put)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
				2024		2025		2026				
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)		100	170.500.000	100	180.000.000	100	185.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial		100	73.500.000	100	81.500.000	100	82.900.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	tersedianya bantuan permakanan bagi Penyandang Disabilitas, Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar diluar panti		20	25.000.000	60	25.500.000	60	25.500.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	tersedianya bantuan sandang bagi Penyandang Disabilitas, Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar diluar panti		10	15.000.000	30	15.500.000	50	16.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	tersedianya alat bantu bagi Penyandang Disabilitas, Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar diluar panti		5	15.500.000	10	20.500.000	20	21.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terlaksananya Pelayanan Reunifikasi bagi keluarga		10	3.000.000	15	3.500.000	20	3.550.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		20	1.000.000	25	1.000.000	30	1.100.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Bimbingan sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		20	1.000.000	25	1.000.000	30	1.100.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.07	Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terlaksananya Pembuatan Nomor NIK Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		15	500.000	20	600.000	25	650.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
				2024		2025		2026				
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Tersedianya Akses kelayanan pendidikan dan Kesehatan Dasar		15	500.000	20	500.000	25	600.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Tersedianya Pemberian layanan Data dan pengaduan		35	1.000.000	40	1.100.000	45	1.100.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan		30	1.000.000	35	1.500.000	40	1.600.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terlaksananya Pemberian Pelayanan penelusuran keluarga		50	3.000.000	55	3.600.000	60	3.700.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Tersedianya layanan Rujukan		3	7.000.000	5	7.200.000	5	7.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial	persentase PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar pantli sosial		100	97.000.000	100	98.500.000	100	102.100.000	297.600.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		10	5.000.000	15	5.000.000	20	5.100.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Layanan Kedaruratan		10	5.000.000	15	5.000.000	20	5.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Tersedianya permakanan		5	20.000.000	10	21.000.000	15	22.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Tersedianya Sandang		10	10.000.000	10	10.500.000	10	11.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Tersedianya alat bantu		20	10.000.000	25	10.000.000	30	10.500.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
				2024		2025		2026				
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Tersedianya Perbekalan Kesehatan di Luar Panti		5	5000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik Mental, Spiritual, dan Sosial	Terselenggaranya Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		10	5.000.000	15	5.000.000	20	5.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Terselenggaranya Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		10	5.000.000	15	5.000.000	20	5.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		10	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Tersedianya Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		30	5000.000	35	5.000.000	40	5000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terselenggaranya Pelayanan Penelusuran Keluarga		30	2.000.000	40	2.000.000	50	2.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terselenggaranya Pelayanan Reunifikasi Keluarga		30	5000.000	40	5.000.000	50	5.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Tersedianya Layanan Rujukan		10	10.000.000	11	10.000.000	12	11.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Mitra dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerjasama antar Lembaga dan Mitra dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.500.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
01.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan Penanganan		100	150.000.000	100	154.500.000	100	185.400.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		10	75.000.000	20	85.000.000	20	90.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Out put)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
				2024		2025		2026				
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terlaksananya fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		10	75.000.000	20	85.000.000	20	90.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.03.2.02.01	Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri											
1.06.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri			10		20		20				
01.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)		100%	400.000.000	100%	415.000.000	100%	430.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial		100%	320.000.000	100%	325.000.000	100%	339.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Tersedianya Permakanan		100	175.000.000	120	180.000.000	150	185.500.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Tersedianya Sandang		80	75.000.000	85	75.000.000	90	80.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Penampungan Pengungsi		2	10.000.000	2	10.000.000	2	11.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terlaksananya Penanganan khusus bagi kelompok Rentan		5	50.000.000	6	50.000.000	7	52.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Tersedianya Pelayanan Dukungan Psikososial		100	10.000.000	120	10.000.000	150	10.500.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
				2024		2025		2026				
				Target	Rp(000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		51	80.000.000	51	90.000.000	51	91.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	3	5	30.000.000	6	35.000.000	7	35.500.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang berkualitas dan berkompetensi dalam penanganan bencana	42	45	50.000.000	45	55.000.000	45	55.500.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.06.3.06.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota											
1.06.06.3.06.02.0003	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana			51		51		51				
01.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan		100,00	250.000.000	100,00	255.000.000	100,00	260.000.000	100,00	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	Terlaksananya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil		0	0,00	0	0,00	0	0,00	18,00		
1.06.02.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT		0	50	0,00	60	0,00	70	0,00	12,00	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Pendampingan KAT		0	50	0,00	60	0,00	70	0,00	6,00	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		0	0	0	0	0	0	6	Dinas Sosial	Dinas Sosial

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Out put)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
				2024		2025		2026				
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		0	0	1	0	1	0	0	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		159	250.000.000	169	255.000.000	187	260.000.000	765.000.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja sosial yang mengikuti Bimtek		90	140.000.000	90	128.000.000	98	116.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKS yang mengikuti Bimtek		21	50.000.000	21	55.000.000	21	60.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		20	5.000.000	25	6.000.000	30	7.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		25	50.000.000	30	60.000.000	35	70.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota		3	5.000.000	3	6.000.000	3	7.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.02.3.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota											
1.06.02.3.03.06	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi		50		70		80				
1.06.02.3.03.07	Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti		25		30		36				
1.06.02.3.03.08	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis		74		74		74				

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Out put)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
				2024		2025		2026				
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106.02.3.04	Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial											
1.06.02.3.04.01	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi		90		90		98				
1.06.02.3.05	Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah											
1.06.02.3.05.01	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi		12		12		12				
01.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	persentase pemeliharaan taman makam pahlawan		100,00	100.000.000	100,00	103.000.000	100,00	123.600.000	326.600.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan TMP Nasional Kabupaten		1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	165.000.000	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		19	20.000.000	19	22.000.000	19	24.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		12	20.000.000	12	22.000.000	12	24.000.000	100	Dinas Sosial	Dinas Sosial

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025–2026 adalah sesuai dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Hal ini ditunjukkan dari hasil akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan Daerah setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sehingga kinerja yang diinginkan tercapai pada akhir Renstra sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 7.1 Indikator Kinerja Program Kabupaten Ende yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD			
					Nilai	K	K	K		K	
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15		
1	6		SOSIAL								
1	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Sub Kegiatan x 100 %	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	Jumlah PSKS yang diberdayakan dibagi Total PSKS x 100 %	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
1	6	3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan Penanganan	Jumlah Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke daerah asalnya x 100 %	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (geandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (geandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM) x 100%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Total Keluarga Miskin x 100 %	76,64	77,01	77,37	77,74	77,74	Dinas Sosial
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	Jumlah korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial x 100 %	100	100	100	100	100	Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Formula	Kondisi Kinerja pada Awal (tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
					Nilai	K	K	K		K
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15	
			total korban bencana							
		2	Persentase (%) Penanganan Korban Bencana alam dan sosial	$\frac{\text{Jumlah TAGANA yang berkualitas dan berkompetensi dalam penanganan bencana}}{\text{Jumlah Tagana seluruhnya}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	$\frac{\text{Jumlah TMP yang di Pelihara}}{\text{Jumlah TMP yang ada}} \times 100\%$	100	100	100	100	Dinas Sosial

Tabel. 7.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Ende

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Formula Penjelasan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akip Dinsos	Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah	Sekretariat
2.	Meningkatnya Perlindungan PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	Jumlah PPKS yang ditangani dibagi Total PPKS dikali 100%	Bidang Penanganan Fakir Miskin, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
3	Meningkatnya Peran PSKS dalam Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang diberdayakan	Jumlah PSKS yang diberdayakan dibagi total PSKS dikali 100%	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tabel. 7.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Keluaran/Output Dinas Sosial Kabupaten Ende

NO	URUSAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI/KELUARAN/ OUTPUT	RUMUS	CAPAIAN KINERJA (2023)	SUMBER DATA	KET
1	2		3	4	5	6	7
6	Sosial	1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Sudah cukup jelas	105	Dinas Sosial	Tertampir
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu RM dan OTM	sda	6.476	Dinas Sosial	Sda
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	sda	-	-	Keterbatasan Dana/anggaran
		4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	sda	324	Dinas Sosial	sda
		5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	sda	2	Dinas Sosial	Tertampir
		6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	sda	21	Dinas Sosial	sda
		7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	sda	-	Dinas Sosial	Keterbatasan Dana/anggaran
		8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	sda	13	Dinas Sosial	sda
		9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	sda	19	Dinas Sosial	sda
		10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	sda	-	-	Keterbatasan Dana/anggaran
		11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	sda	-	-	Keterbatasan Dana/anggaran
		12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	sda	-	-	Keterbatasan Dana/anggaran
		13	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	sda	-	-	Keterbatasan Dana/anggaran
		14	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	sda	21	Dinas Sosial	sda

NO	URUSAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI/KELUARAN/ OUTPUT	RUMUS	CAPAIAN KINERJA (2023)	SUMBER DATA	KET
		15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	sda	21	Dinas Sosial	sda
		16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	sda	8	Dinas Sosial	sda
		17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	sda	2	Dinas Sosial	sda
		18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	sda	4	Dinas Sosial	sda
		19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	sda	38	Dinas Sosial	sda
		20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	sda	13	Dinas Sosial	sda
		21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	sda	2	Dinas Sosial	sda
		22	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	Sudah cukup jelas	3464	Dinas Sosial	TERLAMPIR
		23	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	sda	297	Dinas Sosial	sda
		24	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	sda	-	-	Keterbatasan Dana/anggaran
		25	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	sda	-	-	Keterbatasan Dana/anggaran
		26	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Ada/tidak	-	-	Keterbatasan Dana/anggaran
		27	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	sda	42	Dinas Sosial	TERLAMPIR

Tabel. 7.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil/Outcome Dinas Sosial Kabupaten Ende

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil / Outcome	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	SOSIAL	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis}} \times 100 \%$	100	100	100
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota}} \times 100 \%$	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, ini merupakan sebuah alat manajemen untuk mengelola kondisi saat ini (permasalahan, potensi dan sumber daya) serta petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju 2 (tahun) tahun ke depan yang memuat tentang penjabaran Visi, Misi dan Program Kerja Dinas Sosial, yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial, disusun dengan tetap memperhatikan aspek normatif seperti diatur dalam peraturan Perundangan-Undangan. Penyusunan Program-program dalam RENSTRA ini mengacu pada jumlah program secara hierarkis berada pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan produk-produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam produk hukum yang mengikat.

Dokumen RENSTRA secara normatif telah diupayakan memuat program-program sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi kerja Dinas Sosial Kabupaten Ende termasuk tugas Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan serta tugas lainnya, merupakan pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Ende dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dibuat melalui konsultasi publik dengan melibatkan berbagai stakeholders diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Ende. Untuk menjaga dan mengendalikan pemanfaatan RENSTRA serta konsistensi dokumen dokumen perencanaan lain diperlukan monitoring dan pelaporan secara reguler dan periodik.

Untuk itu diperlukan Tim Monitoring yang terdiri dari unsur Dinas Sosial dan Instansi Terkait dalam rangka mengukur tingkat kinerja dan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta diharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

PJ. BUPATI ENDE ♀
AGUSTINUS G. NGASU

